



Pemerintah
Kabupaten
Pemalang

RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan. Dokumen ini merupakan pedoman strategis bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika selama lima tahun ke depan, sekaligus memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah berjalan searah dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pematang Jaya.

Renstra ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2025–2029. Di dalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan indikator kinerja yang dirumuskan untuk menjawab isu-isu strategis, tantangan teknologi informasi, kebutuhan pemerintahan digital, penguatan keterbukaan informasi publik, penyediaan data statistik sektoral, serta peningkatan keamanan informasi pemerintah daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari dukungan, masukan, dan kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan, serta pihak terkait yang telah memberikan kontribusi dalam proses perumusan Renstra ini.

Harapan kami, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2025–2029 dapat menjadi landasan strategis dalam mendorong transformasi digital pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak dan menjadi pedoman dalam mewujudkan pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang lebih maju dan berkelanjutan.

Pematang Jaya, September 2025
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
1.4. Sistematika Penulisan	I-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ...	II-1
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	II-1
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika.....	II-1
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-4
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-8
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	II-17
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah	II-17
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika.....	II-18
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	II-18
2.2.2. Isu Strategis	II-23
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1. Tujuan dan Sasaran	III-1
3.1.1. Tujuan.....	III-1
3.1.2. Sasaran	III-1
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan	III-4
3.2.1. Strategi.....	III-4
3.2.2. Arah Kebijakan.....	III-6
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1. Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	IV-1
4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika.....	IV-42
4.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika.....	IV-45
BAB V PENUTUP	V-1
5.1. Kesimpulan Substansial.....	V-1
5.2. Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.3. Pedoman Transisi	V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Data Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2025	II-5
Tabel 2.2.	Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan	II-5
Tabel 2.3.	Jumlah Pegawai Diskominfo Kabupaten Pemalang berdasarkan Golongan dan Jabatan.....	II-6
Tabel 2.4.	Sarana dan Prasarana Diskominfo Kabupaten Pemalang Tahun 2024.....	II-7
Tabel 2.5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang	II-12
Tabel 2.6.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024	II-16
Tabel 2.7.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	II-22
Tabel 2.8.	Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah...	II-24
Tabel 3.1.	Tujuan Dinas Komunikasi dan Informasi 2025-2029	III-1
Tabel 3.2.	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika	III-3
Tabel 3.3.	Penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029	III-4
Tabel 3.4.	Teknik Merumuskan Arah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.....	III-7
Tabel 3.5.	Program Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika....	III-11
Tabel 4.1.	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.....	IV-6
Tabel 4.2.	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	IV-23
Tabel 4.3.	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-42
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika	IV-44
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika	IV-46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan	I-3
Gambar 1.2. Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah	I-4
Gambar 1.3. Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang	II-4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi pada era globalisasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu teknologi yang mengalami kemajuan pesat adalah teknologi informasi yang memberikan kemudahan dalam memperoleh berita dan informasi. Komunikasi dan informasi merupakan dua aspek fundamental yang menjadi landasan bagi perkembangan masyarakat modern.

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian pesan atau informasi dari satu individu kepada individu lainnya untuk mencapai pemahaman bersama. Sementara itu, informasi merupakan data atau fakta yang telah diolah sehingga memiliki makna dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan maupun pengembangan pengetahuan.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi dan mengelola pengetahuan. Melalui inovasi teknologi seperti telekomunikasi, jaringan internet, dan perangkat digital, penyebaran informasi dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan tanpa batasan ruang maupun waktu. Kondisi ini memungkinkan terjadinya pertukaran ide, kolaborasi, serta akses terhadap sumber pengetahuan secara global.

Dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, pemerintahan, bisnis, dan kesehatan, teknologi komunikasi dan informasi menjadi alat strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Misalnya, penerapan sistem informasi berbasis digital memungkinkan pengelolaan data yang lebih akurat dan transparan, sementara teknologi komunikasi memperlancar koordinasi antar pihak.

Namun demikian, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi memerlukan tata kelola yang baik agar penyebaran informasi dapat dipercaya dan komunikasi berlangsung efektif. Tantangan seperti penyebaran informasi palsu (misinformasi) dan isu keamanan data harus menjadi perhatian serius untuk menjaga integritas dan manfaat teknologi tersebut. Oleh karena itu, penguasaan serta pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi secara bijaksana menjadi kunci

dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan kemajuan masyarakat di era digital.

Sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan, diperlukan perencanaan strategis yang matang. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh organisasi untuk menetapkan tujuan jangka menengah serta langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan tersebut. Renstra mencakup visi, misi, analisis situasi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam periode waktu tertentu.

Landasan hukum penyusunan Renstra ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan pentingnya dokumen perencanaan pembangunan terintegrasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Selain itu, Renstra ini juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa perangkat daerah harus menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yang disebut dengan Renstra. Renstra perangkat daerah menjadi instrumen strategis lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas.

Penyusunan Renstra ini juga mengacu pada Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta penyelarasan antara Renstra perangkat daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam hal ini, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 akan menjadi penjabaran teknis visi dan misi kepala daerah terpilih, hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, yang dituangkan dalam RPJMD.

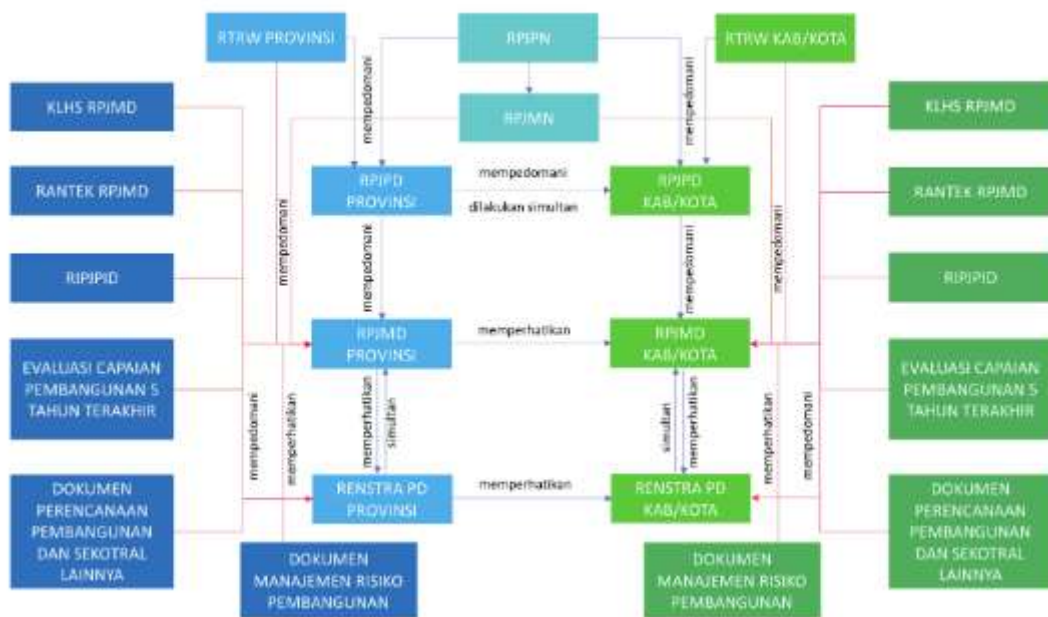
Berdasarkan ketentuan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang (Diskominfo) wajib menyusun dokumen Renstra yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. Diskominfo Kabupaten Pemalang merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian sebagaimana

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang.

Pembentukan perangkat daerah ini bertujuan meningkatkan efektivitas organisasi, mengoptimalkan pelayanan publik, menyatukan berbagai fungsi, serta menghapus struktur dan tugas yang tidak efisien, sehingga organisasi mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Renstra Diskominfo Kabupaten Pematang Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Pematang Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian. Rencana tersebut dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan selama periode lima tahun.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan daerah dapat dilihat pada bagan berikut.



Gambar 1.1 : Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra tersebut juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun

evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.

Selanjutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029. Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut:



Gambar 1.2 : Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;
16. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
17. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2025-2029.
19. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pematang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang; dan
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud.

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang 2025 – 2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 5 tahun, yaitu :

1. Sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pematang Tahun 2025 – 2029 sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang selama kurun waktu 5 tahun (2025 – 2029).

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam jangka 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025 - 2029;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) terkait konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang;
3. Sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Tahun 2025 – 2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

Bab ini memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang, sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang, capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang pada renstra periode sebelumnya, mengulas kelompok sasaran layanan. Bab ini juga memuat permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dan isu strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Bab ini memuat tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tahun 2025 – 2029, sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 serta strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tahun 2025 – 2029.

Bab IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Pada bagian ini diuraikan tentang uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indikator, target dan pagu indikatif dan sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah. Serta memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tahun 2025 – 2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU)

dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

2.1.1. Tugas, fungsi dan struktur Dinas Komunikasi dan Informatika :

Dalam rangka memudahkan pemahaman terhadap isi dan muatan dari gambaran umum kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang serta Peraturan Bupati Nomor &5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang yang telah mengalami perubahan yaitu Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Bina Program dan Keuangan, dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Bidang Penyelenggaraan *e-Government*;
- e. Bidang Statistik dan Persandian;
- f. UPTD, dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing komponen Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Diskominfo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas fungsi tersebut, Kepala Diskominfo menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-government, serta statistik dan persandian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-government, serta statistik dan persandian;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-government, serta statistik dan persandian;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

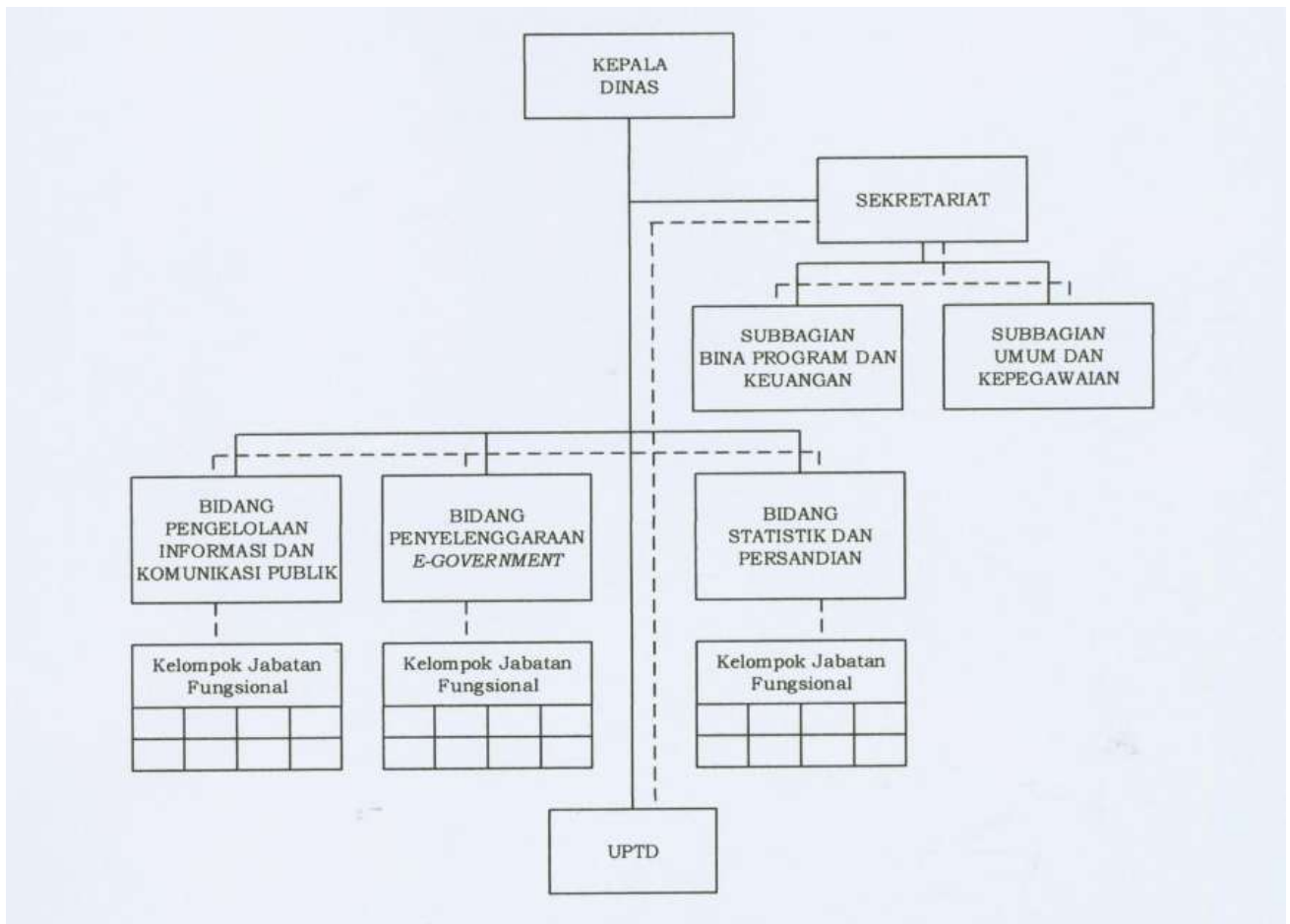
b. Sekretaris

Sekretaris Diskominfo mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Diskominfo. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Diskominfo;
- 2) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Diskominfo;
- 3) Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Diskominfo;

- 4) Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Diskominfo;
 - 5) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Diskominfo; dan
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :
- 1) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - 2) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.
- d. Kepala Bidang Penyelenggaraan *e-Government*
- Kepala Bidang Penyelenggaraan *e-Government* mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelenggaraan *e-Government*. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penyelenggaraan *e-Government* menyelenggarakan fungsi :
- 1) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelenggaraan *e-Government*;
 - 2) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.
- e. Kepala Bidang Statistik dan Persandian
- Kepala Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Statistik dan Persandian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Statistik dan Persandian;
- 2) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.



Gambar 2.1 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.

Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya aset. Masing-masing sumber daya tersebut dapat dijelaskan melalui uraian sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Aparatur pada Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 tercatat sejumlah 81 (delapan puluh satu) Pegawai dengan perincian sebagai berikut

Tabel 2. 1.
Data Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2025

No.	Golongan	L	P	Jumlah
1.	Golongan IV	4	1	5
2.	Golongan III	15	8	23
3.	Golongan II	4	-	4
4.	Golongan I	-	-	-
5.	Non ASN	35	14	49

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang 2025

Berdasarkan latar belakang pendidikan formal yang dimiliki, pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang sebagian besar berpendidikan S1 sebanyak 42 orang, S2 sebanyak 6 orang, D4 sebanyak 2 orang, D3 sebanyak 4 orang dan SMA sebanyak 26 orang, dan SD sebanyak 1 orang. Data pendidikan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2.
Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	S2 / Magister	4	2	-	-	6
2.	S1 / Sarjana	8	3	21	10	42
3.	Diploma IV	-	1	1	-	2
4.	Diploma III	2	-	1	1	4
5.	Diploma II	-	-	-	-	
6.	Diploma I	-	-	-	-	
7.	SMA/ Sederajat	10	2	11	3	26
8.	SMP/ Sederajat	-	-	-	-	
9.	SD	-	-	1	-	1
	Jumlah Total	24	8	35	14	81

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang 2025

Dalam rangka melaksanakan pelayanan dalam komunikasi dan informatika kepada masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 81 (delapan puluh dua), yang terdiri atas ASN/PNS sejumlah 32 (tiga puluh tiga) orang (39,51%), non ASN sejumlah 49 (empat puluh sembilan) orang (60,49%).

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa jumlah ASN dibandingkan dengan seluruh pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang hanya sebesar 39,51% dari jumlah keseluruhan yaitu 81 (delapan puluh dua) orang pegawai yang ada. Kekurangan pegawai yang terjadi selama ini ditutup dengan menggunakan tenaga honorer.

Berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan, sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Siantar terdistribusi sebagaimana tabel 2.3 berikut :

Tabel 2. 3.
Jumlah Pegawai Diskominfo Kabupaten Pematang Siantar berdasarkan Golongan dan Jabatan

No.	Golongan	Jabatan	Jumlah Pegawai	Pendidikan Terakhir
1.	IV C	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	1	S-2 (Magister Manajemen Pembangunan Daerah)
2.	IV B	Sekretaris	1	S-2 (Magister Ilmu Komputer)
3.	IV A	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	1	S-1 Komunikasi
4.	IV A	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>e-Government</i>	1	S-2 (Magister Ilmu Ekonomi)
5.	III D	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1	S-2 (Magister Manajemen)
6.	IV A	Penelaah Teknis Kebijakan	1	S-2 (Teknik)
7.	III D	Sandiman Muda	1	S-1 Manajemen
8.	III D	Stastisi Muda	1	S-1 Ilmu Hukum
9.	III D	Kasubbag Bina Program dan Keuangan	1	S-2 (Magister Sains Akuntansi)
10.	III C	Pengolah Data dan Informasi	1	S-1 Manajemen Perusahaan
11.	III C	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1	D-IV Penyiaran
12.	III C	Pranata Komputer Ahli Pertama/Pertama	1	S-1 Teknik Informatika
13.	III C	Pengolah Data dan Informasi	1	S-1 Ilmu Pemerintahan
14.	III/c	Penelaah Teknis Kebijakan	1	S-1 Ekonomi Manajemen
15.	III/b	Pengadministrasi Perkantoran	1	SMU IPS
16.	III/b	Pengadministrasi Perkantoran	1	SMA A.3/IPS
17.	III/b	Pengadministrasi Perkantoran	1	SMA IPA
18.	III/b	Pranata Komputer Ahli Pertama/Pertama	1	S-1 Sistem Informasi
19.	III/b	Pengolah Data dan Informasi	1	SMU IPS
20.	III/b	Pranata Komputer	1	SMA A.1/Fisika

No.	Golongan	Jabatan	Jumlah Pegawai	Pendidikan Terakhir
		Ahli Muda/Muda		
21.	III/b	Pengadministrasi Perkantoran	1	S-1 Manajemen
22.	III/b	Pengolah Data dan Informasi	1	S-1 Ilmu Pemerintahan
23.	III/b	Pranata Komputer Ahli Pertama/Pertama	1	S-1 Sistem Informasi
24.	III/b	Pranata Komputer Ahli Pertama/Pertama	1	S-1 Teknik Komputer
25.	III/a	Pengadministrasi Perkantoran	1	SMEA Tata Niaga
26.	III/a	Pengadministrasi Perkantoran	1	SMA IPA
27.	III/a	Pengolah Data dan Informasi	1	STM Mesin
28.	III/a	Pengolah Data dan Informasi	1	SMEA Tata Usaha
29.	II/d	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil/Pelaksana	1	D-III Ilmu Komunikasi
30.	II/d	Operator Layanan Operasional 3	1	SMEA Akuntansi
31.	II/d	Pengolah Data dan Informasi	1	SMEA Perkantoran
32.	II/c	Pengadministrasi Perkantoran	1	Paket C

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang 2025

Sementara itu dalam mendukung pelaksanaan tugas berikut sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang

Tabel 2. 4.
Sarana dan Prasarana Diskominfo Kabupaten Pemalang
Tahun 2024

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	8	1	9
2	Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	15	3	18
3	Komputer laptop	Unit	40	7	47
4	Komputer All In One	Unit	46	19	65
5	Komputer Desktop Built Up	Unit	3	9	12
6	Komputer Desktop Rakitan	Unit	5	43	48
7	Komputer Server	Unit	16	12	28
8	AC	Unit	41	5	46
9	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Unit	1		1

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
10	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Unit	10		10
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	12		12
12	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Unit	2		2
13	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Unit	1		1
14	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (dst)	Unit	14		14
15	Pagar Permanen	Unit	1		1
16	Selasar	Unit	1		1
17	Printer	Unit	72	7	79
18	Scaner	Unit	1	2	3
19	Printer Foto Copy	Unit	2		2
20	Foto Copy	Unit		1	1
21	Monitor	Unit		64	64
22	Televisi	Unit	28	2	30
23	Stavolt	Unit		23	23
24	UPS	Unit		3	3
25	VCD Player	Unit		1	1
26	HUB Jaringan	Unit		13	13
27	FM Digital	Unit		4	4
28	Dispenser Kecil	Unit		3	3
29	Telephone IP	Unit	12		12
30	Routers WIFI	Unit		2	2
31	Kursi Besi Gratia	Unit		8	8
32	Kursi Besi Biasa	Unit		3	3
33	Speaker Pasif	Unit		2	2

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode 2020–2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Capaian tersebut tergambar melalui berbagai indikator kinerja strategis yang mencerminkan kemajuan transformasi digital, keterbukaan informasi publik, serta penguatan infrastruktur dan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.

Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengalami peningkatan dari nilai 2,23 pada tahun 2020 menjadi 3,04 pada tahun 2024, dengan rata-rata capaian mencapai 90,21 persen terhadap target Renstra. Peningkatan ini menunjukkan

keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas penerapan sistem digital pada berbagai aspek pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, sekaligus memperkuat efisiensi birokrasi berbasis teknologi informasi.

Pada aspek infrastruktur jaringan, persentase network terintegrasi menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Sejak tahun 2021 hingga 2024, realisasi capaian mencapai 100 persen, melampaui target setiap tahunnya dengan rata-rata persentase capaian di atas 120 persen. Hal ini menandakan bahwa jaringan komunikasi antarperangkat daerah telah terhubung secara optimal dan mendukung implementasi layanan berbasis digital secara terpadu.

Dalam bidang keamanan informasi, tingkat kematangan keamanan informasi (Indeks KAMI) juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Nilai kematangan meningkat dari 20 pada tahun 2020 menjadi 35 pada tahun 2024, dengan capaian kinerja yang melampaui target, yaitu mencapai rata-rata di atas 1.000 persen pada tahun-tahun awal implementasi. Capaian ini mencerminkan peningkatan kesadaran dan kemampuan teknis perangkat daerah dalam menjaga keamanan sistem dan data pemerintahan dari potensi ancaman siber.

Sementara itu, nilai keterbukaan informasi publik terus meningkat secara konsisten dari 74,83 pada tahun 2020 menjadi 85,17 pada tahun 2024, dengan capaian di atas 100 persen dari target. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta memastikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik secara terbuka dan tepat waktu.

Selain itu, penguatan fungsi statistik sektoral juga menunjukkan hasil yang optimal. Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan setiap tahunnya selama periode 2020–2024. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan data statistik telah berjalan dengan baik dan digunakan secara efektif dalam mendukung proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Dari sisi literasi dan partisipasi publik, persentase penduduk yang terpapar informasi publik mengalami peningkatan pesat dari 17,2 persen pada tahun 2020 menjadi 78 persen pada tahun 2024, dengan capaian akhir mencapai 141,82 persen dari target. Capaian ini

menggambarkan keberhasilan strategi diseminasi informasi publik yang dijalankan secara luas melalui berbagai saluran komunikasi, baik media digital maupun konvensional.

Indikator yang mengalami kemajuan pesat adalah persentase ketersediaan informasi publik, yang meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 85,17 persen pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan upaya konsisten pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik, baik melalui penguatan kanal informasi resmi maupun optimalisasi teknologi digital sebagai media komunikasi publik. Dampak dari upaya tersebut terlihat dari meningkatnya proporsi penduduk yang mengakses informasi publik, yang naik signifikan hingga mencapai 80 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif dalam mencari dan memanfaatkan informasi sebagai bagian dari partisipasi mereka dalam pembangunan daerah.

Transformasi digital juga menjadi tonggak penting dalam capaian kinerja Diskominfo Kabupaten Pematang Jaya. Melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, persentase layanan publik yang diselenggarakan secara daring dan terintegrasi berhasil mencapai 100 persen pada tahun 2024. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dan memahami kebijakan serta program prioritas pemerintah meningkat hingga 78,83 persen, menandakan efektivitas strategi komunikasi publik yang dijalankan secara terencana dan berkelanjutan.

Peningkatan akses informasi juga didukung dengan penyediaan informasi tentang sumber daya pelayanan yang mencapai 100 persen, serta akses publik terhadap informasi keuangan daerah yang meningkat hingga 91 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatif.

Dari sisi infrastruktur digital, tingkat keterpaduan jaringan meningkat hingga 88 persen, sedangkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo. Kondisi ini memperkuat kapasitas internal pemerintah daerah dalam berbagi data, berkoordinasi, serta

mengimplementasikan layanan publik berbasis teknologi secara lebih efektif dan efisien.

Dalam bidang statistik sektoral, capaian juga menunjukkan arah kemajuan. Persentase statistik sektoral yang tersedia sesuai standar meningkat menjadi 40 persen, dan seluruh OPD, yaitu 100 persen, telah memanfaatkan data statistik baik dalam penyusunan perencanaan maupun dalam proses evaluasi pembangunan daerah. Hal ini menjadi indikator bahwa pengelolaan data dan informasi telah menjadi bagian integral dalam perencanaan berbasis bukti di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.

Aspek keamanan informasi pemerintah daerah juga menunjukkan perbaikan yang signifikan. Persentase konten informasi yang telah diamankan meningkat pesat hingga mencapai 100 persen pada tahun 2024, menunjukkan keberhasilan dalam penerapan sistem pengamanan data dan jaringan. Sementara itu, tingkat keamanan informasi pemerintah meningkat secara bertahap hingga mencapai 34 persen, yang menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam memperkuat perlindungan terhadap ancaman siber dan kebocoran data.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya selama periode 2020–2024 menunjukkan hasil yang sangat positif. Peningkatan pada berbagai indikator utama menegaskan bahwa arah kebijakan transformasi digital, keterbukaan informasi, serta keamanan data telah berada pada jalur yang tepat. Keberhasilan ini menjadi dasar yang kuat bagi Diskominfo Kabupaten Pematang Jaya dalam merumuskan arah kebijakan strategis periode 2025–2029 untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan.

Tabel 2. 5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pematang

Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun -					Persentase Capaian Pada Tahun - (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE		3,34	3,34	3,35	3,36	3,37	2,23	3,34	2,23	2,94	3,04	66,77	100,00	66,57	87,50	90,21
Persentase Network Terintegrasi		70,73	74	78	82	88	71,00	100	100	100	100	100,38	135,14	128,21	121,95	113,64
Tingkat/Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)		2	2,2	2,3	2,4	2,5	20	20	40	32,50	35,00	1.000,00	909,09	1.739,13	1.354,17	1.400,00
Indeks/Nilai Keterbukaan Informasi Publik		74,83	76	78	79	80	74,83	76	78	79	85,17	100,00	100,00	100,00	100,00	106,46
Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas		0,5	1	2	4	5	0,5	1	2	4	5	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Penduduk yang terpapar Informasi publik		17,2	25	35	45	55	17,2	25	35	45	78	100,00	100,00	100,00	100,00	141,82
Persentase ketersediaan informasi publik	Indeks						66,00	70	74	80	85,17					
Proporsi penduduk yang mengakses informasi publik	%						1	5,00	15	28	80					
Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi	%						66,00	41,18	75	80	100					
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%						27,00	51,30	79	80	78,83					
Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%						40,00	50	50	100	100					
Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%						30,00	40	70	91	91					
Persentase <i>Network</i> terintegrasi	%						70,73	70,73	72	73	88					
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%						70,73	70,73	100	100	100					

Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun -					Persentase Capaian Pada Tahun - (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase statistik sektoral yang tersedia sesuai standar	%						2	22	31	32	40					
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%						100	100	100	100	100					
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%						100	100	100	100	100					
Persentase konten informasi yang telah diamankan (%)	%						20	41	40	96,3	100					
Tingkat keamanan informasi pemerintah	%						20	20	40	32,5	34					

Sumber : Diskominfo Kabupaten Pematang, 2025

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan pola realisasi anggaran yang relatif stabil dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Persentase realisasi mencapai 79,52% pada 2020, kemudian meningkat tajam menjadi 119,49% pada 2021, yang menunjukkan adanya penambahan kebutuhan atau penyesuaian anggaran di luar rencana awal. Pada 2022 dan 2023, realisasi tetap berada di atas rencana dengan capaian 105,29% dan 112,33%, menandakan program ini termasuk prioritas operasional dengan tingkat penyerapan sangat baik. Tren ini mengindikasikan bahwa kebutuhan biaya penunjang pemerintahan seringkali melebihi rencana awal, sekaligus menunjukkan kemampuan OPD dalam mengakselerasi pemenuhan kebutuhan layanan administratif.

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik memperlihatkan ketidakstabilan realisasi dari tahun ke tahun. Pada 2021–2024, realisasi anggaran terlihat fluktuatif dan tidak disertai data persentase resmi. Berdasarkan perbandingan nominal, terlihat bahwa pada beberapa tahun realisasi jauh lebih rendah dari rencana, terutama pada 2022 (sekitar Rp1,65 miliar dari rencana Rp3,57 miliar). Pola ini menunjukkan adanya inefisien perencanaan atau keterbatasan pelaksanaan program, misalnya karena penyesuaian kebijakan, hambatan teknis, atau realokasi anggaran. Ketidakstabilan ini bisa berdampak pada kualitas diseminasi informasi publik, yang menjadi salah satu fungsi penting dalam komunikasi pemerintahan.

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika menunjukkan penurunan persentase realisasi anggaran dari tahun ke tahun. Pada 2020 realisasi berada di kisaran 92,89%, namun turun menjadi 70,73% pada 2021, kemudian anjlok ke 46,48% pada 2022, dan sedikit membaik menjadi 66,60% pada 2023. Pola ini menandakan adanya tantangan dalam implementasi kegiatan, seperti keterlambatan pengadaan aplikasi, perubahan prioritas digitalisasi, atau kurangnya kesiapan perangkat teknis. Rendahnya realisasi dapat berdampak pada lambatnya modernisasi sistem informasi pemerintahan, yang seharusnya menjadi pondasi transformasi digital daerah.

Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial tampak tidak optimal dalam penyerapan anggaran. Realisasi pada beberapa tahun

tercatat sangat rendah, misalnya pada 2020 hanya Rp147.712 dari rencana hampir Rp350 juta. Tahun berikutnya pun realisasi tidak meningkat signifikan dan tetap jauh dari nilai rencana. Minimnya penyerapan anggaran mengindikasikan bahwa kegiatan statistik sektoral belum dijalankan secara maksimal, baik karena kapasitas SDM, kurangnya pemahaman kebutuhan data, atau masih terbatasnya implementasi kegiatan statistik di perangkat daerah. Kondisi ini berpotensi menghambat penyediaan data sektoral yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi menunjukkan fluktuasi besar dalam realisasi anggaran. Tahun 2021 mencatat realisasi yang relatif tinggi yaitu 106,41%, namun kemudian menurun menjadi 70,53% pada 2022 dan kembali turun drastis menjadi 51,66% pada 2023. Pola ini mengindikasikan bahwa keamanan informasi belum menjadi prioritas stabil, padahal kebutuhan penguatan persandian sangat penting untuk mendukung keamanan siber pemerintah daerah. Fluktuasi tajam juga mengindikasikan perencanaan yang kurang konsisten atau tantangan dalam pelaksanaan kegiatan teknis yang berbasis sistem pengamanan.

Secara keseluruhan, pola realisasi anggaran menunjukkan bahwa tidak semua program memiliki perencanaan dan implementasi yang konsisten. Program penunjang pemerintahan relatif stabil dan selalu mencapai target, bahkan melebihi. Sebaliknya, program yang bersifat teknis—khususnya pengelolaan aplikasi, statistik sektoral, dan persandian—menunjukkan kapasitas pelaksanaan yang masih perlu diperkuat. Beberapa program strategis menunjukkan realisasi rendah yang dapat berdampak pada efektivitas pelayanan publik dan transformasi digital daerah.

Tabel 2. 6.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Persentase Realisasi Anggaran (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		9.285.730.100	7.586.000.000	7.586.000.000	7.586.000.000		7.383.728.000	9.064.526.709	7.987.427.645	8.521.273.074		79,52	119,49	105,29	112,33
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		4.060.387.000	3.567.383.000	3.570.000.000	3.575.000.000	-	3.771.504	2.523.113.417	1.659.435.263	2.380.824.289					
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		6.030.000.000	5.230.000.000	5.235.000.000	5.235.000.000		3.771.504.000	5.565.255.978	3.692.199.089	2.704.520.550		92,89	70,73	46,48	66,60
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		349.796.000	350.000.000	355.000.000	360.000.000		147.712	241.724.345	136.101.940	127.221.469					
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		292.796.900	293.000.000	295.000.000	295.000.000		5.853.840.000	187.624.951	113.030.025	275.083.965		97,08	106,41	70,53	51,66

2.1.4. Kelompok sasaran layanan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Raya memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Kelompok sasaran layanan dari dinas ini meliputi :

1. Masyarakat Umum

Layanan informasi publik, layanan aduan masyarakat, layanan akses internet gratis melalui WiFi publik, serta sosialisasi literasi digital ditujukan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pematang Raya.

2. Perangkat Daerah (OPD/Instansi Pemerintah Daerah)

Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi bagi seluruh perangkat daerah, seperti penyediaan jaringan internet antar OPD, pengelolaan aplikasi layanan pemerintahan (*e-Government*), sistem persuratan elektronik, dan pengelolaan website resmi perangkat daerah.

3. Media Massa dan Insan Pers

Dalam hal keterbukaan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan media. Layanan ini mencakup publikasi kegiatan pemerintah, konferensi pers, serta pengelolaan informasi yang akurat dan terpercaya.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah

1. Mitra Internal Pemerintah Kabupaten Pematang Raya

- a. Seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) : sebagai produsen data sektoral, pengguna layanan TIK, dan subjek keterbukaan informasi publik.
- b. Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan Setda : koordinasi publikasi, informasi, dan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah.
- c. Bappeda : sinkronisasi data sektoral, sistem informasi perencanaan, dan integrasi dengan RPJMD.
- d. Inspektorat Daerah : pembinaan tata kelola SPBE, pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan data.
- e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil : pengolahan data kependudukan untuk mendukung layanan publik dan big data.

2. Mitra Eksternal Pemerintah Pusat & Provinsi

- a. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI : regulasi, kebijakan, serta dukungan infrastruktur TIK dan literasi digital.
- b. BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) : keamanan siber dan persandian pemerintah daerah.
- c. KemenPAN-RB : evaluasi SPBE dan tata kelola pelayanan publik berbasis elektronik.
- d. BPS (Badan Pusat Statistik) : koordinasi statistik sektoral, Satu Data Indonesia, dan pembinaan data resmi.
- e. Diskominfo Provinsi Jawa Tengah : sinkronisasi kebijakan komunikasi, informatika, dan keterbukaan informasi publik di tingkat provinsi.

3. Mitra Non-Pemerintah

- a. Media Massa (cetak, elektronik, online) : penyebaran informasi kebijakan dan program Pemkab Pemalang.
- b. Perguruan Tinggi/Universitas : riset, pengembangan aplikasi, dan literasi digital.
- c. Komunitas IT & Start-up Lokal : inovasi aplikasi layanan publik dan *smart city*.
- d. Organisasi Masyarakat & KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) : perantara informasi ke masyarakat desa.
- e. Asosiasi/LSM di bidang keterbukaan informasi dan advokasi digital.
- f. Perusahaan Telekomunikasi & Penyedia Infrastruktur Internet : dukungan jaringan komunikasi dan data center.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang

1) Permasalahan Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat

untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang sebagai PPID utama Pemerintah Kabupaten Pemalang mengupayakan keterbukaan informasi publik di seluruh badan publik dapat berjalan dengan baik, permasalahan yang timbul dalam implementasi UU Keterbukaan informasi publik adalah kesiapan seluruh badan publik untuk menyediakan seluruh layanan informasi publik yang belum menyeluruh, belum semua badan publik termasuk dalam kategori informatif. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang UU KIP, hingga implementasi yang belum efektif di berbagai badan publik. Dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan sebagai leading sektor layanan pengaduan di Pemerintah Kabupaten Pemalang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang senantiasa memberikan respon dan tanggapan yang cepat pada aduan yang masuk. Namun pada penyelesaian aduan yang melibatkan OPD lain terkadang masih ada beberapa respon yang lambat dari pengelola aduan di masing-masing OPD sehingga perlu lebih ditingkatkan komitmen dari seluruh OPD di Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk memberikan dukungan pada pengelolaan dan penyelesaian aduan.

2) Permasalahan Pengembangan SPBE

Pelaksanaan SPBE memerlukan fondasi dan regulasi yang kuat dan menyeluruh agar dapat berjalan dengan konsisten, terukur, dan berkelanjutan di instansi pemerintahan. Namun hingga saat ini ketersediaan regulasi terkait pelaksanaan SPBE belum semua dapat terpenuhi. Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan SPBE banyak menghadapi berbagai permasalahan seperti mengintegrasikan berbagai sistem digital yang berjalan secara terpisah, masih terjadinya tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan, adanya duplikasi infrastruktur dan sistem informasi, standardisasi TIK yang belum optimal, pemanfaatan data dan informasi yang bisa dibagikan yang belum maksimal

sehingga arsitektur SPBE yang tepat dan terarah memberikan peluang untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan terintegrasi dengan baik dan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terukur. Dengan adanya arsitektur yang terintegrasi, data dapat diakses dan dianalisis dengan lebih cepat, yang pada akhirnya akan meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Sehingga dalam hal ini diperlukan kolaborasi/cross cutting dengan beberapa perangkat daerah dalam memberikan dukungan pada pelaksanaan dan implementasi SPBE. Sementara itu, pengembangan SPBE dalam aspek infrastruktur telematika, masalah yang terjadi adalah perkembangan teknologi menuntut penyesuaian peningkatan keterampilan SDM pengelola, meningkatnya ancaman keamanan siber, ketidakpastian ekonomi dapat mengganggu perencanaan penganggaran terkait infrastruktur jaringan, perkembangan kebutuhan data dan informasi yang meningkat membutuhkan penyesuaian kemampuan kapasitas infrastruktur jaringan, perlunya peremajaan perangkat jaringan yang usia pemakaiannya sudah melebihi standar, ketergantungan kinerja organisasi pada teknologi digital menuntut penanganan kendala pada infrastruktur jaringan yang lebih cepat serta perubahan regulasi menuntut adanya penyesuaian terhadap pengelolaan infrastruktur jaringan.

3) Permasalahan Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Dalam upaya peningkatan pembangunan statistik di Indonesia telah diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dengan Satu Data Indonesia (SDI) diharapkan akan menghasilkan data dan informasi yang berkualitas untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan statistik sektoral yaitu pengelolaan data statistik sektoral yang dilaksanakan oleh perangkat daerah guna menghasilkan data statistik yang berkualitas belum dilaksanakan pengelolaan data statistik sektoral yang sesuai standar. Nilai rata-rata Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Pematang Jaya saat ini adalah 2,59 masih dalam kategori cukup, yaitu proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih

menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri. Perangkat daerah masih kesulitan dalam mengidentifikasi kegiatan statistik yang dilakukan. Pembinaan dalam hal identifikasi kegiatan statistik bersama dengan BPS Kabupaten Pemalang kepada seluruh perangkat daerah sudah mulai dilakukan pada tahun 2025 tetapi masih perlu dilakukan pembinaan secara intens kepada masing-masing perangkat daerah untuk mengidentifikasi kegiatan statistik.

4) Permasalahan Peningkatan Keamanan Informasi

Dalam era digital yang terus berkembang, tantangan terkait keamanan data dan privasi pengguna menjadi semakin kompleks. Menjaga keamanan data dan melindungi privasi pengguna adalah tugas krusial, dan dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memerlukan solusi inovatif. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mengupayakan dengan mengidentifikasi tantangan dan menerapkan solusi yang tepat, memitigasi risiko terkait keamanan data dan privasi pengguna, menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah risiko keamanan informasi yakni ancaman yang terkait dengan informasi yang disimpan, diolah, dan dipertukarkan oleh sebuah organisasi atau individu. Informasi ini dapat berupa data sensitif seperti informasi keuangan, informasi pribadi, informasi kesehatan, dan informasi rahasia lainnya. Ancaman keamanan informasi ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti *hacker*, virus komputer, kegagalan sistem, kejahatan siber, dan insiden keamanan lainnya. Oleh karena itu, risiko keamanan informasi merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh organisasi dan individu. Permasalahan selanjutnya adalah kesadaran keamanan informasi (*IT security awareness*) yang belum menyeluruh pada aparatur di Pemerintah Kabupaten Pemalang. Kesadaran keamanan informasi adalah kemampuan individu atau organisasi untuk memahami dan mengenali risiko keamanan informasi serta melakukan tindakan untuk mengurangi risiko tersebut. Kesadaran keamanan informasi penting karena dapat membantu organisasi dan individu untuk menghindari serangan siber dan kehilangan data yang sensitif.

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya selama lima tahun terakhir, beberapa permasalahan utama dapat diidentifikasi. Permasalahan tersebut menjadi fokus penting dalam meningkatkan kinerja pelayanan organisasi ke depan, yaitu :

Tabel 2. 7.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Belum seluruh badan publik termasuk dalam kategori informatif. - Layanan informasi publik belum dilaksanakan secara menyeluruh dan efektif. - Respons terhadap aduan masyarakat masih belum optimal karena keterlibatan lintas OPD yang belum konsisten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap ketentuan UU No. 14 Tahun 2008. - Kapasitas SDM PPID pembantu belum merata di setiap perangkat daerah. - Belum adanya sistem koordinasi yang efektif antar-OPD dalam penyelesaian aduan publik.
Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya seluruh regulasi pendukung pelaksanaan SPBE. - Belum optimalnya integrasi antar sistem digital di lingkungan pemerintah daerah. - Terdapat duplikasi infrastruktur dan tumpang tindih fungsi sistem informasi. - Standardisasi TIK dan arsitektur SPBE belum terimplementasi secara menyeluruh. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan regulasi teknis dan pedoman pelaksanaan SPBE. - Rendahnya koordinasi antarperangkat daerah dalam integrasi sistem. - Ketergantungan pada sistem sektoral yang berjalan terpisah. - Keterbatasan kapasitas SDM pengelola TIK dan keamanan siber. - Infrastruktur jaringan belum sepenuhnya diperbarui sesuai kebutuhan teknologi terkini.
Penyelenggaraan Statistik Sektoral	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan statistik sektoral belum sepenuhnya memenuhi standar Satu Data Indonesia. - Kualitas data statistik sektoral belum optimal. - Perangkat daerah masih kesulitan mengidentifikasi kegiatan statistik yang dilakukan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman dan kemampuan teknis perangkat daerah terhadap pedoman statistik sektoral masih terbatas. - Pembinaan dari instansi pembina (BPS) belum dilakukan secara intensif dan menyeluruh. - Belum tersedianya sistem pengelolaan data sektoral yang terintegrasi di seluruh perangkat daerah.
Peningkatan Keamanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko ancaman keamanan informasi yang meningkat seiring perkembangan teknologi digital. - Kesadaran keamanan informasi di kalangan aparatur pemerintah masih rendah. - Belum optimalnya sistem perlindungan terhadap data sensitif dan infrastruktur digital pemerintah daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya tingkat literasi dan kesadaran keamanan siber pada aparatur. - Keterbatasan sumber daya dan anggaran dalam penerapan sistem keamanan informasi. - Belum adanya kebijakan teknis dan standar operasional prosedur keamanan informasi yang komprehensif. - Peningkatan ancaman siber dan serangan digital yang memerlukan mitigasi

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		berkelanjutan.

2.2.2. Isu strategis

Isu strategis adalah situasi yang memiliki potensi menjadi tantangan atau peluang bagi suatu daerah di masa mendatang. Dalam konteks Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang, isu-isu strategis berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian. Isu-isu ini mencerminkan aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian khusus untuk meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang serta mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. Isu strategis berdasarkan tidak hanya mendasarkan pada hasil analisis data yang menggambarkan permasalahan yang dihadapi, tetapi juga dengan memperhatikan potensi, isu KLHS, global, nasional, regional dan daerah.

Tabel 2. 8. Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infrastruktur digital yang terus membaik dilihat dari akses internet yang sudah menjangkau seluruh wilayah dan adanya jaringan fiber optic, BTS, atau jaringan 4G/5G. Keberadaan pusat data atau server lokal yang terus berkembang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbukaan Informasi Publik ▪ Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ▪ Penyelenggaraan Statistik Sektoral ▪ Peningkatan Keamanan Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tidak terlibat secara langsung dalam isu strategis dalam KLHS tetapi mendukung penyelesaian isu strategis tersebut melalui tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disrupsi Teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IPTEKIN dan Riset Lemah ▪ Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah ▪ Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya tata kelola pemerintahan menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan berintegritas. Kondisi ini ditunjukkan dengan kinerja Reformasi Birokrasi, SPBE, Pengawasan dan Pengendalian serta manajemen ASN berbasis Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah yang membaik dari tahun-tahun sebelumnya namun dampak terhadap kualitas pelayanan publik dan capaian pembangunan daerah belum meningkat signifikan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan data statistik yang didukung keamanan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Dapat disimpulkan bahwa isu strategis pembangunan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 adalah **belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan data statistik yang didukung keamanan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.** Kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi informasi yang tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pemerintahan kepada masyarakat. Selain itu, penggunaan data statistik sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan juga masih perlu ditingkatkan, termasuk aspek keamanan data yang menjadi landasan penting dalam era digital saat ini. Kurangnya optimalisasi ini berpotensi menghambat kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan layanan publik yang transparan, cepat, dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dalam memperkuat sistem teknologi informasi, meningkatkan literasi digital di lingkungan pemerintah, serta memastikan perlindungan data melalui penerapan standar keamanan informasi yang memadai.

BAB III

TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Tujuan

Tujuan Renstra Perangkat Daerah adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029, dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Pemalang yaitu “PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA” dengan mendukung misi ke 7 (tujuh) Digitalisasi yaitu : Memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menetapkan tujuan sebagai berikut :

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi

Untuk mengukur keberhasilan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang diatas ditetapkan indikator kinerja Persentase meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi dengan perhitungan sebagai berikut

Tabel 3.1.
Tujuan Dinas Komunikasi dan Informasi 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi	Indeks Pemerintahan Digital (SPBE)	indeks	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7

3.1.2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Sasaran yang akan dicapai Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dalam jangka waktu tahun 2025-2029 yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

- 1 Meningkatkan pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi
- 2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja jangka menengah tahun 2025-2029 pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dapat dirinci pada Tabel 3.2. sebagai berikut :

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator (4)	Satuan (5)	Baseline 2024 (6)	Target Tahun						Ket (13)
						2025 (7)	2026 (8)	2027 (9)	2028 (10)	2029 (11)	2030 (12)	
Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi		Indeks Pemerintahan Digital (SPBE)	Indeks	3,04	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	
		Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi	Nilai Domain Layanan	Indeks	0	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	
			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	0	2,59	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	
			Nilai Domain Tata Kelola	Indeks	0	2,4	3	3,2	3,4	3,6	3,8	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	76	77	78	79	80	81	82	
			Nilai SAKIP	Angka	70,60	71	72	73	74	75	76	

Agenda pembangunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dibagi dalam lima tahapan pembangunan. Pembagian tahapan ini dimaksudkan agar dalam menyusun target dalam mencapai prioritas pembangunan dapat lebih realistis dan dapat terlihat ukuran capaian setiap periodenya. Selain itu, tahapan disusun agar Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menyesuaikan dengan kondisi sumber daya (anggaran, SDM, infrastruktur) yang terbatas, sehingga perlu prioritas bertahap, bukan sekaligus.

Adapun tahapan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika selama periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan infrastruktur dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah dan pelayanan publik	Pengembangan infrastruktur TIK dalam Peningkatan keamanan data dan Kualitas Pelayanan Publik	Akselerasi Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Digital didukung dengan keamanan data	Integrasi berbagai aplikasi layanan publik untuk meningkatkan keterpaduan, efisiensi, dan transparansi layanan	Penerapan Data statistik sektoral daerah yang aman, terintegrasi dan berbasis teknologi informasi guna mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

Sasaran 1. Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi.

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah :

- a. Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan menjangkau seluruh perangkat daerah untuk mendukung penyelenggaraan layanan publik berbasis digital.
- b. Meningkatkan kualitas dan integrasi sistem aplikasi layanan pemerintahan, termasuk penyediaan layanan digital yang mudah diakses, responsif, dan memenuhi standar keamanan informasi.

- c. Memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui penyesuaian arsitektur SPBE, integrasi layanan, serta penggunaan platform bersama antarperangkat daerah.
- d. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penguasaan teknologi informasi melalui pelatihan, pendampingan teknis, sertifikasi kompetensi, serta pembiasaan penggunaan aplikasi pemerintahan digital.
- e. Mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) layanan digital untuk memastikan layanan pemerintah berbasis TI berjalan efektif, terukur, aman, dan memiliki kualitas yang seragam.
- f. Mendorong pemanfaatan dan analisis data digital dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja layanan publik agar lebih cepat, tepat, dan berbasis bukti.
- g. Meningkatkan keamanan siber dan keandalan pengelolaan informasi pemerintah melalui penguatan persandian, manajemen risiko keamanan informasi, serta perlindungan data pemerintah dan masyarakat.
- h. Mendorong literasi digital masyarakat agar layanan pemerintahan berbasis TI dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pengguna dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.

Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah :

- a. Memperkuat tata kelola manajemen kinerja perangkat daerah melalui penyusunan perjanjian kinerja yang lebih terukur, pemantauan capaian secara berkala, serta pemanfaatan sistem informasi kinerja terintegrasi.
- b. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan layanan dan manajemen kinerja melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, coaching, dan penguatan budaya kerja profesional.
- c. Mengembangkan sistem pengelolaan pengaduan dan aspirasi masyarakat yang responsif guna meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat mekanisme evaluasi berbasis masukan masyarakat.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan publik dan monitoring kinerja untuk

meningkatkan kecepatan layanan, transparansi, serta efisiensi proses kerja.

- e. Memperkuat sistem evaluasi internal perangkat daerah melalui audit kinerja, reviu, serta evaluasi mandiri yang dilakukan secara berkala untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi.

3.2.2. Arah Kebijakan

Kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan arah program yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam beraktivitas. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan pemerintah yang terintegrasi dan berkelanjutan.
- b. Pengembangan dan optimalisasi layanan pemerintahan digital melalui penyediaan aplikasi layanan publik yang terpadu, mudah diakses, dan memenuhi standar keamanan informasi.
- c. Penguatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui integrasi layanan, penyelarasan arsitektur SPBE, dan peningkatan interoperabilitas antarperangkat daerah.
- d. Peningkatan kapasitas aparatur dalam penguasaan teknologi informasi guna memastikan kualitas pengelolaan layanan digital dan percepatan transformasi digital pemerintahan.
- e. Peningkatan tata kelola data dan keamanan informasi melalui penguatan persandian, implementasi manajemen risiko keamanan siber, serta perlindungan data pemerintah dan masyarakat.
- f. Peningkatan literasi digital masyarakat untuk mendorong pemanfaatan layanan publik berbasis teknologi informasi secara lebih optimal dan inklusif.
- g. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui penyusunan dan penerapan standar pelayanan serta SOP yang memenuhi prinsip transparansi, efektivitas, dan kebutuhan masyarakat.
- h. Penguatan tata kelola manajemen kinerja perangkat daerah melalui penerapan sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang terintegrasi dan berorientasi hasil.

- i. Peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan publik dan manajemen kinerja melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.
- j. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan publik dan pemantauan kinerja untuk mendukung pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien.
- k. Penguatan sistem pengelolaan pengaduan dan aspirasi masyarakat guna meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat mekanisme evaluasi berbasis partisipasi publik.
- l. Peningkatan efektivitas evaluasi internal dan pengawasan kinerja melalui audit kinerja, reviu, monitoring, dan tindak lanjut hasil evaluasi secara konsisten.
- m. Peningkatan budaya kerja berintegritas dan akuntabel melalui penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang objektif, profesional, dan sesuai ketentuan.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Teknik Merumuskan Arah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1		1. Peningkatan kualitas digitalisasi pelayanan pemerintahan difokuskan pada peningkatan tata kelola arsitektur SPBE, mendorong kualitas SMART City, dan kualitas layanan aduan masyarakat; 2. Peningkatan kualitas satu data difokuskan pada peran produsen data dan penyediaan data sektoral; 3. Peningkatan keamanan informasi daerah; 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada	a. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan pemerintah yang terintegrasi dan berkelanjutan. b. Pengembangan dan optimalisasi layanan pemerintahan digital melalui penyediaan aplikasi layanan publik yang terpadu, mudah diakses, dan memenuhi standar keamanan informasi. c. Penguatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
		<p>pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat;</p>	<p>(SPBE) melalui integrasi layanan, penyesuaian arsitektur SPBE, dan peningkatan interoperabilitas antarperangkat daerah.</p> <p>d. Peningkatan kapasitas aparatur dalam penguasaan teknologi informasi guna memastikan kualitas pengelolaan layanan digital dan percepatan transformasi digital pemerintahan.</p> <p>e. Peningkatan tata kelola data dan keamanan informasi melalui penguatan persandian, implementasi manajemen risiko keamanan siber, serta perlindungan data pemerintah dan masyarakat.</p> <p>f. Peningkatan literasi digital masyarakat untuk mendorong pemanfaatan layanan publik berbasis teknologi informasi secara lebih optimal dan inklusif.</p> <p>g. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui penyusunan dan penerapan standar pelayanan serta SOP yang memenuhi prinsip transparansi, efektivitas, dan kebutuhan masyarakat.</p> <p>h. Penguatan tata kelola manajemen kinerja perangkat daerah</p>	

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
			<p>melalui penerapan sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang terintegrasi dan berorientasi hasil.</p> <p>i. Peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan publik dan manajemen kinerja melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.</p> <p>j. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan publik dan pemantauan kinerja untuk mendukung pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien.</p> <p>k. Penguatan sistem pengelolaan pengaduan dan aspirasi masyarakat guna meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat mekanisme evaluasi berbasis partisipasi publik.</p> <p>l. Peningkatan efektivitas evaluasi internal dan pengawasan kinerja melalui audit kinerja, review, monitoring, dan tindak lanjut hasil evaluasi secara konsisten.</p> <p>m. Peningkatan budaya kerja berintegritas dan akuntabel melalui penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang objektif,</p>	

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
			profesional, dan sesuai ketentuan.	

Program Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Dokumen RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5. **Program Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika**

No	Visi/ Frase Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Outcome	Indikator Program
	“PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA”						
		T2 Meningkatnya reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi			
			S2. Meningkatkan kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik	Maturitas SPIP	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berbasis teknologi informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya menyusun berbagai program strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan informasi publik, penguatan infrastruktur digital, serta pengamanan data dan komunikasi pemerintah daerah. Program-program tersebut dirancang untuk memperkuat integrasi antar perangkat daerah, mendorong inovasi berbasis teknologi, dan mewujudkan pemanfaatan data yang akurat serta aman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun uraian program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan layanan informasi dan komunikasi baik terutama antar perangkat daerah melalui layanan jaringan intra, layanan pengaduan, dan layanan data center. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya menetapkan berbagai kegiatan dan subkegiatan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut yaitu:

a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Relasi Media
- 2) Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
- 3) Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- 4) Pelayanan Informasi Publik
- 5) Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- 6) Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
- 7) Diseminasi Informasi
- 8) Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- 9) Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
- 10) Penyusunan Konten

- 11) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada upaya sinergi dan integrasi aplikasi seperti melalui pemakaian aplikasi berbagi pakai dan bimbingan pengembangan aplikasi yang terpadu untuk mendukung perwujudan *smart city*. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya menetapkan berbagai kegiatan dan subkegiatan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut yaitu:

a. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
- 2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
- 3) Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
- 4) Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
- 5) Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
- 6) Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
- 7) Penyediaan Akses Internet
- 8) Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
- 9) Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas

3. Program Pengembangan Statistik Sektoral

Program ini diarahkan pada perwujudan satu data melalui penerapan portal data menuju layanan data terbuka. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya menetapkan berbagai kegiatan dan subkegiatan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut yaitu:

a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional
- 2) Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
- 3) Peningkatan Kualitas Statistik Sektora
- 4) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
- 5) Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
- 6) Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral

4. Program Penyelenggaraan Pesandian untuk Pengamanan Informasi

Program ini diarahkan pada ketangguhan layanan keamanan informasi pemerintah daerah melalui *assessment* aplikasi, digital forensik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Menandang menetapkan berbagai kegiatan dan subkegiatan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut yaitu:

a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- 2) Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan
- 3) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
- 4) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan, tata kelola administrasi, serta dukungan sumber daya yang diperlukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Menandang menetapkan berbagai kegiatan dan subkegiatan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut yaitu:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 8) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 10) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pengadaan Alat Besar
- 4) Pengadaan Mebel
- 5) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- 4) Pemeliharaan Mebel
- 5) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 8) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 4.1.
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisiensi, dengan pelayanan publik yang baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi				Indeks Pemerintahan Digital (SPBE)		
		Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi			Nilai Domain Layanan		
					Nilai Domain Tata kelola		
					Indeks Pembangunan Statistik		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
					Nilai SAKIP		
			Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota		Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi		
				Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi	Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan	dan Fungsi	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Fasilitas Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi	Persentase Fasilitas Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	Penyediaan Barang Cetakan dan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Perundang-undangan	Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penggandaan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Pengadaan Alat Besar	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa	Jumlah Laporan	Penyediaan Jasa	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kab/ kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Relasi Media	
				Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
				Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
				Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Pelayanan Informasi Publik	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					komunikasi publik		
				Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
				Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Diseminasi Informasi	
				Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
				Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Penyusunan Konten	
				Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
			Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
					Persentase Layanan		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		
				Terlaksananya pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah		
				Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional		
				Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
				Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
				Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Penyediaan Akses Internet	
				Terlaksananya koordinasi penyusunan	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola	Koordinasi penyusunan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
			Meningkatnya penyelenggaraan statistik sektoral		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
					Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		
				Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai Renstra Kominfo)	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral		
				Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	
				Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
				Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	Peningkatan Kualitas Statistik Sektora	
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
				Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
				Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Satu Data Daerah			
			Meningkatnya keamanan informasi pemerintah		Tingkat Maturitas Keamanan Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
				Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase sistem elektronik/ aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah		
				Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
				Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
				Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

Tabel 4.2.
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024										
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi	%	100	100	7.567.59 6.000	100	9.272.7 02.756	100	9.272.70 2.756	100	9.272.7 02.756	100	9.272.702 .756
		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi	%	100	100		100		100	100	100	100	100	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi	Dokum en	27	29	1.288.10 1.448	29	1.578.3 32.384	29	1.578.33 2.384	29	1.578.3 32.384	29	1.578.332 .384
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokum en	4	6	161.012.6 81	6	197.291. 548	6	197.291. 548	6	197.291 .548	6	197.291.5 48
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokum en	3	3	161.012.6 81	3	197.291. 548	3	197.291. 548	3	197.291 .548	3	197.291.5 48

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024										
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3	3	161.012.681	3	197.291.548	3	197.291.548	3	197.291.548	3	197.291.548
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	4	161.012.681	4	197.291.548	4	197.291.548	4	197.291.548	4	197.291.548
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	4	161.012.681	4	197.291.548	4	197.291.548	4	197.291.548	4	197.291.548
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	161.012.681	3	197.291.548	3	197.291.548	3	197.291.548	3	197.291.548
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	161.012.681	3	197.291.548	3	197.291.548	3	197.291.548	3	197.291.548

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024										
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	3	3	161.012.681	3	197.291.548	3	197.291.548	3	197.291.548	3	197.291.548
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi	Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi	%	100	100	966.076.086	100	1.183.749.288	100	1.183.749.288	100	1.183.749.288	100	1.183.749.288
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12	12	161.012.681	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	161.012.681	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	161.012.681	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	161.012.681	1	197.291.548	1	197.291.548	1	197.291.548	1	197.291.548

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024										
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokum en	1	1	161.012.6 81	1	197.291. 548	1	197.291. 548	1	197.291 .548	1	197.291.5 48
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Lapora n	3	3	161.012.6 81	3	197.291. 548	3	197.291. 548	3	197.291 .548	3	197.291.5 48
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	%	100	100	644.050. 724	100	789.166 .192	100	789.166. 192	100	789.16 6.192	100	789.166.1 92
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokum en	0	1	161.012.6 81	1	197.291. 548	1	197.291. 548	1	197.291 .548	1	197.291.5 48
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dokum en	0	50	161.012.6 81	50	197.291. 548	50	197.291. 548	50	197.291 .548	50	197.291.5 48
Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	400	600	161.012.6 81	600	197.291. 548	600	197.291. 548	600	197.291 .548	600	197.291.5 48

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024										
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200	200	161.012.681	200	197.291.548	200	197.291.548	200	197.291.548	200	197.291.548
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Fasilitas Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi	Persentase Fasilitas Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi	%	100	100	1.610.126.810	100	1.972.915.480	100	1.972.915.480	100	1.972.915.480	100	1.972.915.480
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	6	161.012.681	10	197.291.548	10	197.291.548	10	197.291.548	10	197.291.548
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	15	161.012.681	15	197.291.548	15	197.291.548	15	197.291.548	15	197.291.548
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	12	161.012.681	15	197.291.548	15	197.291.548	15	197.291.548	15	197.291.548
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	12	161.012.681	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20	12	161.012.681	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024										
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	10	12	161.012.681	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	3	161.012.681	5	197.291.548	5	197.291.548	5	197.291.548	5	197.291.548
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	30	161.012.681	30	197.291.548	30	197.291.548	30	197.291.548	30	197.291.548
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	5	161.012.681	6	197.291.548	6	197.291.548	6	197.291.548	6	197.291.548
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	12	161.012.681	15	197.291.548	15	197.291.548	15	197.291.548	15	197.291.548
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	%	100	100	1.127.088.767	100	1.381.040.836	100	1.381.040.836	100	1.381.040.836	100	1.381.040.836
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	1	161.012.681	1	197.291.548	1	197.291.548	1	197.291.548	1	197.291.548

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024										
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	1	161.012.681	1	197.291.548	1	197.291.548	1	197.291.548	1	197.291.548
Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	2	161.012.681	2	197.291.548	3	197.291.548	3	197.291.548	3	197.291.548
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	3	161.012.681	3	197.291.548	6	197.291.548	6	197.291.548	6	197.291.548
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	8	161.012.681	8	197.291.548	10	197.291.548	10	197.291.548	10	197.291.548
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	2	161.012.681	2	197.291.548	2	197.291.548	2	197.291.548	2	197.291.548
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	161.012.681	1	197.291.548	1	197.291.548	1	197.291.548	1	197.291.548
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	644.050.724	100	789.166.192	100	789.166.192	100	789.166.192	100	789.166.192
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5000	12	161.012.681	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	161.012.681	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024										
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		dan Listrik yang Disediakan												
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lapora n	10	12	161.012.6 81	12	197.291. 548	12	197.291. 548	12	197.291 .548	12	197.291.5 48
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapora n	12	12	161.012.6 81	12	197.291. 548	12	197.291. 548	12	197.291 .548	12	197.291.5 48
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	%	100	100	1.288.10 1.441	100	1.578.3 32.384	100	1.578.33 2.384	100	1.578.3 32.384	100	1.578.332 .384
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	12	161.012.6 81	12	197.291. 548	12	197.291. 548	12	197.291 .548	12	197.291.5 48
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	12	161.012.6 81	12	197.291. 548	12	197.291. 548	12	197.291 .548	12	197.291.5 48

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024										
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	12	12	161.012.681	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548
Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	12	12	161.012.681	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	161.012.681	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	12	12	161.012.681	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	40	161.012.674	45	197.291.548	45	197.291.548	45	197.291.548	45	197.291.548
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	1	161.012.681	3	197.291.548	3	197.291.548	3	197.291.548	3	197.291.548
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024										
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	80	32	583.524. 000	34	1.464.0 13.200	35	1.464.01 3.200	36	1.464.0 13.200	37	1.464.013 .200
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kab/ kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	%	80	80	583.524. 000	83	1.464.0 13.200	84	1.464.01 3.200	85	1.464.0 13.200	86	1.464.013 .200
Relasi Media	Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Lapora n	40	48	53.047.00 0	48	133.092. 100	48	133.092. 100	48	133.092 .100	48	133.092.1 00
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan	Komuni tas	5	5	53.047.00 0	5	133.092. 100	5	133.092. 100	5	133.092 .100	5	133.092.1 00

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024										
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		terdaftar di Dinas Kominfo												
Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Lapora n	0	1	53.047.00 0	1	133.092. 100	1	133.092. 100	1	133.092 .100	1	133.092.1 00
Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	12	12	53.047.00 0	12	133.092. 100	12	133.092. 100	12	133.092 .100	12	133.092.1 00
Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	%	100	100	53.047.00 0	100	133.092. 100	100	133.092. 100	100	133.092 .100	100	133.092.1 00
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi	Rekomendasi	4	4	53.047.00 0	4	133.092. 100	4	133.092. 100	4	133.092 .100	4	133.092.1 00

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024										
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		prioritas Pemerintah Daerah												
Diseminasi Informasi	Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	%	30	32	53.047.00 0	34	133.092. 100	35	133.092. 100	36	133.092 .100	37	133.092.1 00
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	4	4	53.047.00 0	4	133.092. 100	4	133.092. 100	4	133.092 .100	4	133.092.1 00
Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokum en	0	1	53.047.00 0	1	133.092. 100	1	133.092. 100	1	133.092 .100	1	133.092.1 00
Penyusunan Konten	Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	1800	1800	53.047.00 0	1800	133.092. 100	1800	133.092. 100	1800	133.092 .100	1800	133.092.1 00
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang	200	100	53.054.00 0	100	133.092. 200	100	133.092. 200	100	133.092 .200	100	133.092.2 00

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024										
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika	%	100	100	5.289.00 0.000	100	4.728.0 61.685	100	4.728.06 1.685	100	4.728.0 61.685	100	4.728.061 .685
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	83	44		51		59		66		73	
Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan e- government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	5.289.00 0.000	100	4.728.0 61.685	100	4.728.06 1.685	100	4.728.0 61.685	100	4.728.061 .685
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	100	100		100		100		100		100	
Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokum en	1	1	587.666.6 66	1	525.340. 187	1	525.340. 187	1	525.340 .187	1	525.340.1 87

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024										
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	41	41	587.666.666	41	525.340.187	41	525.340.187	41	525.340.187	41	525.340.187
Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	1	1	587.666.666	1	525.340.187	1	525.340.187	1	525.340.187	1	525.340.187
Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Aplikasi	1	1	587.666.666	1	525.340.187	1	525.340.187	1	525.340.187	1	525.340.187
Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Laporan	1	1	587.666.666	1	525.340.187	1	525.340.187	1	525.340.187	1	525.340.187

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024										
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Laporan	1	1	587.666.666	1	525.340.187	1	525.340.187	1	525.340.187	1	525.340.187
Penyediaan Akses Internet	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	41	41	588.666.672	41	525.340.189	41	525.340.189	41	525.340.189	41	525.340.189
Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	587.666.666	1	525.340.187	1	525.340.187	1	525.340.187	1	525.340.187
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	1	1	586.666.666	1	525.340.187	1	525.340.187	1	525.340.187	1	525.340.187
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024										
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100.000. 000	100	133.113 .700	100	133.113. 700	100	133.11 3.700	100	133.113.7 00
		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100		100		100		100		100	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai Renstra Kominfo)	%	100	100	100.000. 000	100	133.113 .700	100	133.113. 700	100	133.11 3.700	100	133.113.7 00
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	%	1	1,25		1,5		1,75		2		2,25	
Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	%	0,75	1,6	30.000.00 0	2	30.000.0 00	2,5	30.000.0 00	3	30.000. 000	3,5	30.000.00 0

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024										
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%	39,27	42	30.000.000	45	30.000.000	48	30.000.000	50	30.000.000	55	30.000.000
Peningkatan Kualitas Statistik Sektora	Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	%	100	100	20.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	65	70	10.000.000	70	10.000.000	70	10.000.000	70	10.000.000	70	10.000.000
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	%	100	100	5.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000
Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Laporan	2	2	5.000.000	2	13.113.700	2	13.113.700	2	13.113.700	2	13.113.700
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN	Meningkatnya keamanan	Tingkat Maturitas Keamanan Informasi	%	34	35	50.000.000	36	353.790.600	37	353.790.600	38	353.790.600	39	353.790.600

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024										
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	informasi pemerintah													
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%	100	100	50.000.0 00	100	353.790 .600	100	353.790. 600	100	353.79 0.600	100	353.790.6 00
		Persentase sistem elektronik/ aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	%	-	20		25		30		40		50	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Lapora n	1	4	25.000.00 0	4	203.790. 600	4	203.790. 600	4	203.790 .600	4	203.790.6 00
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Lapora n	1	1	5.000.000	1	50.000.0 00	1	50.000.0 00	1	50.000. 000	1	50.000.00 0

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024										
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	1	40	5.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Dokumen	1	1	15.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000

Tabel 4.3.
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota a. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota b. Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE c. Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah d. Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE e. Penyediaan Akses Internet f. Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah g. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	

4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur strategis yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya dalam mendukung pembangunan daerah. IKU mencerminkan capaian hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program prioritas yang berkontribusi

langsung terhadap visi dan misi kepala daerah.

Penyusunan IKU dilakukan secara terintegrasi dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti RPJMD dan Rencana Pembangunan Nasional. IKU disusun dengan prinsip SMART (*Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*) sehingga dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja. Berikut adalah indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang:

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Pemerintahan Digital (SPBE)	Indeks	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7
2.	Nilai Domain Layanan	Indeks	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7
3.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,59	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20
4.	Nilai Domain Tata Kelola	Indeks	2,4	3	3,2	3,4	3,6	3,8
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	77	78	79	80	81	82
6.	Nilai SAKIP	Angka	71	72	73	74	75	76

4.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran utama yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya selama periode perencanaan. IKK disusun secara terukur, relevan, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pematang Jaya. Berikut adalah indikator kinerja kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya:

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	37,00	44,00	51,00	59,00	66,00	73,00
3.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	30,00	32,00	34,00	35,00	36,00	37,00
4.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	34,00	35,00	36,00	37,00	38,00	39,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029.

5.1. Kesimpulan Substansial

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang selaras dengan Visi dan Misi Bupati. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang telah direncanakan lima tahun kedepan. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra ini akan sangat bergantung pada komitmen seluruh ASN, dukungan pimpinan daerah, serta sinergi dengan berbagai pihak terkait.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029.

Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang wajib berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Pemalang. Diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi akan dilaksanakan secara periodik (triwulanan dan tahunan) untuk memantau capaian kinerja dan mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk perumusan kebijakan, penyesuaian strategi, dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan ASN. Laporan capaian kinerja akan disampaikan kepada Bupati dan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.